

DOKTOR ILMU SOSIAL UNDIP

Pengamat Politik Nur Hidayat Sardini

Jateng Jadi Medan Pertarungan Sesungguhnya



Perhelatan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di 2019 bakal membuat suasana politik panas, termasuk di Jawa Tengah. Tak hanya itu, pasca-pesta demokrasi tersebut, atmosfer dan peta politik pun dipastikan ikut terpengaruh. Apakah Jawa Tengah yang selama ini disebut sebagai "Kandang Banteng" akan tetap menjadi lumbung suara terbesar bagi PDIP dan pasangan yang diusung? Bagaimana Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini meneropong politik Jateng pada 2019? Berikut wawancaranya dengan wartawan Tribun Jateng, Rika Irawati.

Pemilu 2019 di depan mata. Bagaimana Anda melihat kesiapan penyelenggara pemilu di Jateng mengikuti pesta demokrasi ini?

Saya bisa menilai, KPU, Bawaslu, dan DKPP siap dalam menghadapi Pemilu 2019. Saya melihat, secara struktural, mereka sudah siap 100 persen. KPU sudah membentuk jajarannya sampai tingkat bawah, begitu pula Bawaslu. DKPP pun sudah membentuk tim pemeriksa daerah yang bertugas membantu sidang pemeriksaan kalau ada pengaduan ke DKPP lalu memerlukan pemeriksaan setempat di daerah. Jadi, kesiapan penyelenggara Pemilu sudah 100 persen, sudah sangat siap.

Tapi, saya masih menyak-wasangka Bawaslu. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan teman-teman pengawas dari Magelang, Pati, Klaten, Banyumas, juga Pekalongan. Mereka curhat terkait apa yang sedang terjadi dalam pengawasan Pemilu 2019, lebih khusus menghadapi *election day* (hari pencoblosan, 17 April 2019). Memang sudah dibentuk. Tapi, pelatihan dan peningkatan kapasitas hingga tingkat bawah, mereka rasakan masih kurang. Yang kurang inilah yang harus segera dipenuhi. Kalau tidak, Bawaslu yang dimanjakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa malafungsi karena peluang itu (malafungsi) besar.

Saya masih merasa kurang yakin. Entahlah, mungkin awal 2019 bisa dikejar terkait *capacity building* itu. Masih ada waktu. Dan, bukan hanya kapasitasnya yang perlu ditingkatkan tetapi juga perlunya kehati-hatian dan pembinaan intensif terkait kemungkinan-kemungkinan integritas yang dipertanyakan pemangku kepentingan.

Apa dampaknya bagi Pemilu?

Jika masalah *capacity building* ini tidak segera dipenuhi, tentu akan mempengaruhi integritas Pemilu. Secara struktural dan fungsional, Bawaslu sekarang sangat kuat. Bawaslu permanen di tingkat provinsi sudah sejak 2014. Sementara, di tingkat kabupaten/kota, (komisioner) Bawaslu yang berjumlah 5-7 orang itu, mulai permanen untuk Pemilu 2019. Ini, sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mulai Pemilu 2019 pula, pengawasan dilakukan hingga tingkat TPS. Kalau dulu, di Pemilu 2009-2014, pengawas di bawah jajaran kabupaten/kota itu hanya sampai Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pengawas Pemilu Lapangan pun satu desa hanya ada satu orang. Tetapi sekarang, setiap TPS ada satu pengawas. Bisa dikatakan, di mana ada KPU di situ ada Bawaslu. Artinya, pemilu ini akan terkawal secara paralel dari jenjang paling bawah (TPS) sampai paling atas (tabulasi data pusat). Setiap jenjang ini harus terkawal dan pengawasan itu yang pasti, selain secara kapasitas, mereka harus mumpuni.

Problemnya, jika kapasitas pengawas di tingkat bawah tidak terpenuhi? Harus dipahami dulu definisi Pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu yang mengawakan dua pemilihan besar, legislatif dan presiden. Konsekuensi cukup besar terkait perkawinan dua pemilu itu. Pemilu legislatif saja merupakan pemilu yang sangat kompleks apalagi ini bersamaan dengan pemilihan presiden.

Dalam pemilihan legislatif, persoalan yang selalu terulang adalah terkait manipulasi suara, baik mengurangi atau mencutikan suara kandidat di masing-masing TPS. Banyak form juga yang harus diisi. Pengisian ini rumit bagi mereka yang tidak paham. Sedangkan, yang sudah berpengalaman saja kadang-kadang keliru dalam pengisian, baik dalam menempatkan kolom, baris, dan angka.

TPS ini kan basis. Seluruh tahapan dimulai dari TPS. Kemudian, hasil dari TPS ini diteruskan hingga ke pusat. Saat di TPS terjadi kesalahan, ada perbaikan. Tapi, kalau kesalahan itu baru diketahui di pusat, makin *complicated*. Dan saat hasil pemilu digugat di MK, induk data yang digunakan kembali lagi ke TPS. Pemilu itu soal TPS, PPS dan PPK. Jadi, pengawas harus fokus pada tugas dan fungsi

Dr Nur Hidayat Sardini SSoS Msi

Lahir: Pekalongan, 10 Oktober 1969

Pekerjaan: Dosen dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Rekam Jejak:

-Ketua Panwaslu Jateng (2003-2004)

-Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (2008-2011)

-Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (2012-2017)

-Bersama empat anggota Bawaslu 2008-2011,

Februari-Maret 2010, mengajukan uji materi ke MK terkait sejumlah

ketentuan dalam pasal Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 dan dibatalkan

sehingga lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010.

-Ikut berjuang mempertahankan keberadaan Bawaslu

dalam forum Panja Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu,

yang belakangan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Media sosial:

Twitter @nurhidayatsardi;

Facebook Nur Hidayat Sardini;

Instagram nhsardini;

YouTube nhsardini;

web pribadi: www.nurhidayatsardini.com.

Email: nhsardini@gmail.com, nhsardini@live.undip.ac.id.

pengawasan itu.

Belum lagi persoalan terkait daftar pemilih. Daftar pemilih tetap (DPT) memang sudah ditetapkan tapi masih dimungkinkan terus berubah. Terutama, karena mobilitas pemilih yang tidak dilaporkan. Akibatnya, banyak formulir C6 atau undangan untuk memilih di satu TPS yang dikembalikan. Di Pilgub Jateng terakhir saja, dari 27 pemilih, ada 10 yang dikembalikan. Ini berarti data pemilih tidak valid. Padahal, di pemilu 2019 nanti, tempatnya masih sama, orangnya relatif sama, pelaku politik juga masih sama. Dengan pengembalian C6 yang masih banyak ini, rawan terjadi penyalahgunaan lewat pencoblos ganda.

Belum lagi masalah antre surat suara. Jika satu TPS mengalami kekurangan surat suara, harus menunggu surat suara dari TPS terdekat. Nah, kalau TPS terdekat juga mengalami persoalan serupa, ini jadi persoalan lagi.

Dan yang paling saya khawatirkan adalah, perhitungan suara karena penggabungan dua jenis pemilu tadi. Waktu perhitungan bisa molor. Padahal, sesuai amanat undang-undang, perhitungan suara harus selesai di hari yang sama. Padahal, biasanya, proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan pengisian formulir bisa memakan waktu sampai 14 jam.

Ini baru elektoral proses. Belum lagi masalah eksternal, semisal politik uang dan persoalan lain yang butuh pengawasan. Jadi, masalah disintegritas ini cukup rawan.

Berharap ridha Tuhan dan berharap Bawaslu yang sudah *settle* secara fungsional dan struktural, benar-benar siap. Mereka di tingkat bawah (TPS) harus sudah dilatih untuk urusan teknis seperti ini. Bagaimana mereka memahami keabsahan suara? Apakah setiap TPS akan mengalami hal sama? Termasuk melatih saksi yang kini juga menjadi tugas Bawaslu.

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab Bawaslu lewat pelatihan dan pembekalan sesering mungkin karena peluang menciptakan Pemilu berintegritas secara struktural dan fungsional harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harapannya, di sisa waktu ini, problem itu bisa dipenuhi. Idealnya, makin ke bawah struktur, makin tinggi *capacity building*-nya. Integritas pemilu ada di ujung bawah struktur ini.

Bagaimana Anda melihat kesiapan warga Jateng menghadapi Pemilu 2019?

Saya melihat, tidak ada kemajuan yang dicapai terkait pemilih kita. Identifikasi pemilih kita masih

sama, pasif, perlu didorong. Kalau tidak dikompori tidak datang ke TPS. Watak kita sejak dulu memang tidak agresif (ambil bagian). Asas kita ini *voluntary*, suka-suka saja memilih.

Kemudian, kondisi rawan terdampak politik uang juga masih tinggi. Terutama, pada kapasitas daya beli masyarakat kita yang dikonotasi kurang. Kita lihat, masyarakat yang punya hak pilih, tapi ga punya uang, bertemu dengan kandidat yang punya uang, tapi kadang-kadang tidak punya suara seperti yang dia bayangkan. Kalau ini ketemu, tinggal transaksi saja. Dan, potensi ini di Jateng, tinggi.

Saya sangat menentang politik uang. Ini mengobrak-abrik logika dan hati nurani. Entah itu bisa dilakukan atau tidak, keadaan yang akan menunjukkan. Saya berharap, di sisa waktu ini, segera dibenahi dan perlu dikoordinasi antara KPU, Bawaslu, penegak hukum, dan pemangku lain. Ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak, biaya pemilu yang begitu besar bisa mubazir.

Selama ini, Jateng disebut-sebut sebagai "Kandang Banteng". Namun, di Pilgub 2018, calon yang diusung PDIP hanya menang tipis dari penantang (Ganjar-Yasin memperoleh 58,78 persen sementara Sudirman Said-Ida memperoleh 41,22 persen). Apakah hasil Pilgub tersebut bisa menjadi gambaran hasil di Pilpres tahun depan? Prediksi Anda?

Secara data, dari pemilu ke pemilu, PDIP (di Jateng) kan menang. Pemilu setelah Orde Baru, PDIP tidak pernah kalah. Saya masih percaya, Jateng masih bisa disebut sebagai Kandang Banteng karena perolehan suara memenangkan PDIP. Hasil pemilu tak tergoyahkan dengan angka di atas 50 persen.

Tapi, pergerakan pemilih kita juga dinamis. Contohnya, hasil Pilgub di daerah lain, selisih 10 juta suara itu bisa dikatakan jauh. Tapi, bagi wilayah yang disebut Kandang Banteng, itu bukan angka besar. Dan ini terjadi di lima daerah di Jateng yang biasa disebut sebagai basis Banteng. Ini berarti, Banteng pun bisa diusir keluar oleh pemilihnya.

Bagaimana melihatnya? Sosok yang maju dalam pemilihan kepala pemerintahan itu mutlak. Semisal, survei terbaru di Jateng tentang paslon nomor urut 1 (Jokowi-Ma'aruf) dan paslon nomor urut 2 (Prabowo-Sandiaga) mencapai 54:32, menurut saya, ini mirip dalam Pilgub. Konotasi Banteng, (masih) kuat di Jateng. Tapi, secara perolehan suara, melihat angka itu, akan tidak mungkin bisa dikejar. Saya memperkirakan, perolehan suara Jokowi di Jateng masih besar, tapi selisihnya tidak akan jauh.

Apalagi, yang saya dengar, hasil survey internal satu paslon yang tidak publikasikan, ada beberapa daerah di Jateng yang dimenangkan paslon 2. Dan, (dari 35 kabupaten/kota di Jateng) ada 15 daerah (yang menang). Ini sejenis dengan Pilgub lalu. Kalau tidak ada strategi jitu untuk mendefensi, (perolehan suara) akan terpaud lebih sedikit dibanding perolehan di Pilgub lampau.

Bagaimana Anda melihat strategi Badan Pemenangan Nasional Sandiaga Uno yang akan memindahkan markas di Jateng? Apakah efektif mencuri suara?

Strategi BPN Sandiaga Uno ini harus dilihat secara serius oleh tim pemenangan paslon Jokowi-Ma'aruf sebagai ancaman. Tujuan paslon dua kan menipiskan selisih suara karena potensi suara paling besar kan di Jabar, Jatim, dan Jateng. Berkaca pada pilpres 2014, wilayah (yang mengandung unsur kata) barat mengkhawatirkan bagi paslon 1, semisal Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Barat.

Kalau Sandi akan memindahkan BPN ke Jateng, saya yakin, targetnya bukan hanya memenangkan, tapi target minimal untuk menipiskan jarak dalam rangka mengakumulasi suara secara nasional karena mereka tahu suara yang mereka miliki. Kalau Jateng digoyang-goyang, tentu akan merepotkan paslon nomor 1.

Dan, saya melihat, tim pemenangan paslon nomor 1 kurang defensif melihat kondisi ini. Saya lihat, mereka bukan pede (percaya diri) tapi masih menganggap (Jateng) ini zona nyaman. Dan itu berbahaya sekali. Seperti di Jakarta, siapa yang menyangka Anis (Baswedan) akan menang? Tim pemenangan paslon nomor urut 1 harusnya lebih agresif. Harus lebih defensif. Defensif itu memang jauh lebih berat.

Kemunculan Sandi, menurut saya, berhasil

mencuri perhatian. Sekarang ini, paslon tidak bisa hanya mengandalkan kerja partai koalisi karena partai juga sibuk memikirkan Pileg. Dan itu, dilakukan Sandi agar efektif mencuri suara di Jateng.

Beberapa waktu lalu, saat Sandi kampanye di Pasar Bulu, saya lihat, tidak ada media mainstream yang memberitakan. Tapi, kegiatannya itu secara masif tersampaikan ke pemilih. Tim mereka bekerja lewat cara menginformasikan lewat media sosial. Dan isu-isu semisal harga bahan pokok di pasar, tarif listrik, harga BBM, yang diusung, terkonfirmasi kepada ibu-ibu. Ini menjadi bahan konstruksi pengambilan keputusan di hari pencoblosan nanti. Ini yang saya tidak lihat dilakukan oleh Timses kubu paslon nomor 1.

Kampanye seperti apa yang efektif dilakukan masing-masing paslon di Jateng?

Jenis kampanye yang paling efektif, secara teori, adalah *canvase campaign*, kampanye yang mengkanvas semua keadaan. Misalnya, lewat *door to door* atau *man to man* yang terus menerus di ujung pemilu.

Langkah Sandi, cukup efektif mencuri suara. Ada kawan di lingkungan mereka yang selalu memetakan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan, termasuk dalam hal ini targetnya Jawa Tengah, khususnya Solo. Karena, menembak Solo akan punya makna politis yang besar. Saya kira, paslon nomor 2 punya modal itu. Di dukung tokoh yang punya latar belakang agama dan kemampuan memobilisasi massa, tentu ini bisa jadi indikator.

Tentu, kondisi ini akan menarik. Dan bisa dikatakan, Jateng akan menjadi *the real of battle ground*, medan pertarungan sesungguhnya. Simpul di sini (Jateng) cukup menarik. Jabar diklaim mendukung paslon 2, sementara Jatim masih separo-separo.

Nah, dalam hal kampanye, masing-masing paslon harus melakukan *smart campaign*. Dalam Pemilu, yang dicari adalah idol pemimpin. Secara politik, masing-masing harus cerdas menyampaikan konten. Bisa lewat program, kritik, dan negative campaign. Asalkan, bukan *black campaign*.

Saya rasa, Pilgub bisa menjadi kaca benggala. Masing-masing paslon bisa menyampaikan dan menjaga diri, bahkan lewat debat yang digelar, mereka tetap menjaga diri dan punya tata krama. Nyatanya, itu berhasil menggeser suara. Artinya, tidak lewat politisasi identitas pun bisa menghasilkan. Baik petahana (Ganjar) masih menang dan penantang (Sudirman Said) masih memperoleh suara. Dan saya sebut, suara itu tidak terpaud jauh-jauh amat dari perkiraan banyak pihak sebelumnya. Jadi, berkampanye secara santun pun tak menghilangkan tujuan berkampanye, yakni memilihnya di tanggal 17 April mendatang. (*)